

KONSTRUKSI IDEOLOGI DAN CITRA POLITIK DI BALIK NASKAH PIDATO KEPRESIDENAN PERTAMA JOKO WIDODO

Menik Lestari

Mahasiswa Pascasarjana Linguistik Deskriptif, FIB Universitas Indonesia
meniklestari89@gmail.com; menik.lestari01@ui.ac.id

ABSTRAK

Naskah pidato sebagai salah satu bentuk arsip umum negara memiliki peran sebagai salah bentuk komunikasi politik. Ardial (2010) menyatakan bahwa komunikasi politik juga berfungsi untuk membangun citra aktor politik yang tidak disampaikan secara gamblang dalam teks. Naskah pidato kepresidenan perdana Jokowi pada tahun 2014 tentunya juga memuat konstruksi ideologi dan citra politik yang ia bangun untuk pemerintahan yang akan ia pimpin lima tahun mendatang. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran naskah dalam mengkonstruksi citra dan ideologi politik pada pidato kepresidenan perdana Jokowi tahun 2014. Melalui pendekatan analisis tiga dimensi CDA Fairclough (1995), penelitian ini bertujuan untuk membongkar konstruksi citra dan ideologi politik yang ada dalam naskah pidato tersebut. Hasil penelitian membuktikan secara umum naskah pidato tersebut berisi harapan dan keinginan Jokowi dalam pemerintahan 2014—2019. Selain itu, ideologi politik yang dikonstruksikan dalam naskah adalah (1) pengembalian kejayaan sektor maritim Indonesia, (2) pemerataan pembangunan, dan (3) penguatan figur Soekarno. Ideologi politik tersebut dikonstruksikan melalui penggunaan kosakata ideologis seperti jalesveva jayamahe, cakrawati samudra, dan ungkapan metaforis nahkoda-kapal. Adapun citra yang dikonstruksikan dalam naskah pidato adalah Jokowi sebagai sosok rakyat dan pekerja keras yang dibangun dari penggunaan dan urutan kosakata sapaan yang mementingkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kata Kunci: *naskah, pidato, Jokowi, ideologi, citra, politik, CDA*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berpolitik, komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting. Lord Windlesham dalam Junaedi (2013) menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima apa yang disampaikan dan menolak dari pihak lain. Ardial (2010) mengatakan bahwa komunikasi politik juga bertujuan untuk membangun citra politik yang tidak dijelaskan secara gamblang di depan khalayak. Dengan demikian, ada pesan yang implisit yang disampaikan aktor politik dalam komunikasi politiknya.

Salah satu bentuk komunikasi politik adalah pidato kenegaraan. Menurut UU No. 43 tahun 2009, naskah pidato tersebut tergolong sebagai arsip umum. Naskah pidato sebagai arsip ini memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan bernegara karena memuat tujuan-tujuan yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Bahkan, naskah pidato kenegaraan dibuat oleh tim khusus seperti staf kepresidenan agar maksud dan pesannya sampai kepada pembaca.

Arsip sebagai wacana memiliki peran penting yang mencerminkan kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fairclough (1992;1995) bahwa wacana adalah praktik sosiokultural. Artinya, arsip sebagai sebuah wacana dapat menggambarkan keadaan sosial kultural atau konteks di luar teks itu sendiri. Selanjutnya, Fairclough (1995) juga menjelaskan bahwa di dalam teks, ada yang hadir/eksplisit (*present in*) dan ada yang tidak hadir/implisit (*absent in*) dan analisis muatan implisit dapat memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya *given*. Sebuah wacana mirip dengan gunung es yang muncul di atas permukaan laut —itu adalah analisis kritis tanggung jawab untuk mengungkapkan makna tersembunyi di wacana (Van Dijk, 1997). Dengan demikian, metode CDA dapat digunakan untuk membongkar makna tersembunyi yang terdapat dalam sebuah wacana.

Salah satu wacana yang menarik untuk diteliti adalah naskah pidato kenegaraan Joko Widodo ketika pertama kali diangkat menjadi presiden pada tahun 2014. Pidato kenegaraan perdana Joko Widodo tersebut tentunya memuat cita-cita lima tahun ke depan sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, pidato kenegaraan sebagai bentuk komunikasi politik tentunya memiliki tujuan khusus bagi aktor politik, khususnya membangun citra politiknya. Pembangunan citra politik tersebut tentunya tidak dijelaskan

secara gamblang dalam naskah sehingga analisis wacana kritis menjadi pisau analisis yang tepat dalam membongkar makna tersembunyi tersebut. Dengan demikian, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran naskah pidato sebagai wacana yang membangun citra dan ideologi Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan citra dan ideologi politik Joko Widodo melalui naskah pidato perdananya sebagai presiden pada tahun 2014. Citra dan ideologi politik tersebut tentunya dijelaskan secara implisit dalam naskah pidato sehingga peran analisis wacana kritis menjadi sangat penting untuk membongkarnya. Philips dan Jorgensen (2002) menyatakan bahwa CDA sebagai suatu pendekatan telah memberikan teori dan metode empiris yang menghubungkan suatu wacana dan konteks sosial budaya. Dengan demikian, CDA diharapkan mampu membedah korelasi antara naskah pidato dan konteks yang melingkunginya sehingga citra dan ideologi politik Joko Widodo dalam naskah pidato tersebut dapat tergambarkan dengan jelas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang dijadikan sumber adalah arsip naskah pidato perdana Joko Widodo saat pelantikan presiden 2014 yang terdapat pada laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yakni kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id. Data tersebut akan dianalisis menggunakan CDA Fairclough (1992;1995) untuk melihat wacana dan konteks yang melingkupinya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yakni pemberitaan seputar Joko Widodo. Naskah pidato dilihat atas tiga dimensi Fairclough (1992;1995), yakni dimensi teks, dimensi praktik diskursif, dan dimensi praktik sosiokultural. Analisis tiga dimensi Fairclough tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pembangunan citra dan ideologi politik dalam naskah pidato perdana Joko Widodo sebagai presiden.

ANALISIS

Tahap Deskripsi Naskah Pidato Presidensial Pertama Joko Widodo

Fairclough (1992;1995) menyatakan ada tiga bagian untuk mendeskripsikan teks, yakni struktur, kosakata, gramatika. Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada unsur kosakata karena unsur tersebutlah yang paling dominan dalam menonjolkan ideologi yang ada. Adapun kosakata menarik yang ditemukan dalam teks adalah kosakata yang mengandung ideologi bangsa Indonesia sebagai berikut.

1. Penggunaan frasa *persatuan dan gotong royong* yang menggambarkan semboyan bangsa Indonesia. Frasa ideologis tersebut terdapat dalam paragraf pertama.

Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. (p.1 b.4).

Selain itu, frasa *gotong royong* juga diulang sebanyak empat kali dalam naskah pidato. Hal itu menunjukkan pentingnya frasa tersebut dalam menyampaikan maksud pidatonya. Kata *persatuan* dan *gotong royong* tersebut sesuai dengan semboyan kebangsaan Indonesia, yakni *bhineka tunggal ika*. Semboyan tersebut memiliki arti '*berbeda-beda tetapi tetap satu jua*' yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Semboyan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena beragamnya suku, bahasa, agama yang ada di Indonesia.

2. Penggunaan semboyan TNI AL Indonesia, *jalesveva jayamahe* dan *cakrawarti samudera* pada paragraf ketiga baris terakhir.

*Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana (p.3 b.4).
kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung*

Penggunaan semboyan tersebut menunjukkan cita-cita Joko Widodo mewujudkan Indonesia yang berjaya sebagai negara maritim.

3. Penggunaan metafora *nahkoda* pada bagian penutup sangat menarik.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi (p.7).

Joko Widodo menggunakan metafora untuk menggambarkan status barunya sebagai presiden, yakni nahkoda atas kapal Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kuasanya sebagai orang yang menjalankan amanah untuk menyetir jalannya pemerintahan. Akan tetapi, ia akan tunduk atas kehendak rakyat dan konstitusi dalam menjalankan kemudi pemerintahannya. Penggunaan metafora nahkoda dan kapal untuk presiden dan pemerintahan ini sangat cocok. Joko Widodo juga ingin menegaskan fungsinya sebagai presiden adalah menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi.

Tahap Interpretasi: Ideologi Politik di Balik Naskah Pidato Jokowi

Naskah pidato presidensial pertama Joko Widodo ini diproduksi dalam rangka pelantikannya sebagai presiden di hadapan para anggota MPR dan usai mengucapkan sumpah jabatan. Pada laman kepustakaan presiden Perpustakaan Nasional RI, naskah pidato singkat tersebut berisi janji Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Akan tetapi, janji-janji tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada laman tersebut. Adapun apabila dilihat lagi dalam teks naskah pidato tersebut, janji pemerintahan Jokowi terdapat dalam struktur bagian isi naskah. Adapun dua janji utama yang menarik untuk dibahas adalah hadirnya negara sampai pelosok negeri dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan (p.2 l.2).

Kalimat tersebut menggunakan proses mental afeksi untuk menjelaskan maksudnya lebih dalam, yakni pembangunan yang merata di seluruh negeri. Jokowi sebagai presiden menunjukkan kuasanya dengan penggunaan frasa pemerintahan yang saya pimpin. Cita-citanya dalam pembangunan secara merata di seluruh negeri tersebut juga tergambar dalam tiga poin nawacita pemerintahan Jokowi 2014—2019 dalam laman Kominfo.



**Gambar 1. Nawacita Pemerintahan Jokowi 2014—2019,
Sumber gambar: Kominfo**

Dengan demikian, poin pertama dan utama yang ditanamkan dalam naskah pidato perdana Jokowi sebagai presiden adalah membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan melakukan pembangunan secara menyeluruh hingga pelosok negeri.

Janji yang kedua mengenai fokus utama Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terdapat pada penggunaan kosakata yang sarat akan unsur laut, seperti nahkoda, laut, gelombang, ombak, jalesveva jayamahe dan cakrawarti samudera. Ideologi kejayaan maritim itu sangat kuat digambarkan dalam naskah pidato tersebut terutama pada penggunaan semboyan TNI AL jalesveva jayamahe ‘Di Lautan Kita Jaya’.



Gambar 2. Lambang TNI AL

Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana (p.3 b.terakhir).

Penggunaan frasa semboyan nenek moyang tersebut merujuk pada asal-usul semboyan jalesveva jayamahe, yakni zaman Majapahit. Pada zaman tersebut, semboyan tersebut digunakan oleh angkatan laut Majapahit untuk membangkitkan semangat. Dengan demikian, naskah pidato tersebut berisi penekanan kepada masyarakat Indonesia untuk mengingat kembali jati diri bangsa sebagai negara maritim.

Nainggolan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya menyatakan bahwa narasi poros maritim dunia Jokowi hampir mirip dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember tahun 1957 pada masa Soekarno. Djuanda adalah nama perdana menteri yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Menurut laman Jurnal Maritim, deklarasi tersebut diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia dan dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jati diri inilah yang ingin diingatkan kembali oleh Jokowi dalam naskah pidato perdananya dan mencita-citakan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia karena identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Nainggolan (2015), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, menyatakan bahwa pentingnya peran sektor maritim Indonesia ini sudah diimplementasikan jauh sebelum Indonesia terbentuk, yakni ketika Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil di setiap daerah. Kuatnya maritim Indonesia di masa lalu tidak hanya berkulat di Asia Tenggara, tetapi juga sampai Afrika. Akan tetapi, kuatnya sektor maritim Indonesia di masa lalu tersebut kian surut karena mundurnya Sriwijaya dan Majapahit dan diperburuk lagi oleh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Soekarno mulai menaruh perhatian kembali pada sektor maritim yang ditandai dengan munculnya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Akan tetapi, Soekarno belum sempat mengimplementasikannya karena pergantian pemerintahan Soeharto.

Pencanangan kembali pentingnya sektor maritim Indonesia oleh Jokowi dalam naskah pidato perdananya sebagai presiden tahun 2014 seperti meneruskan kembali perhatian Soekarno pada sektor maritim Indonesia yang belum sempat diimplementasikan oleh Soekarno. Ideologi politik Jokowi yang berpusat pada Soekarno tampak jelas pada implementasi kebijakan poros maritim dunia ini. Selain itu, Jokowi juga dengan gamblang menyebutkan pesan Soekarno di bagian penutup naskah pidato.

...mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung...(p.7)

Hal tersebut tentu terkait juga dengan afiliasi politik Jokowi, yakni PDIP-Perjuangan yang dikomando langsung oleh anak dari Soekarno, yakni Megawati Soekarno Putri.

Tahap Eksplanasi: Peran Naskah Pidato dalam Membangun Citra Figur Politik

Sebuah arsip tentunya memiliki peran penting sebagai wacana yang mencerminkan keadaan sosiokultural yang melingkupinya, tak terkecuali pada naskah pidato kepresidenan pertama Jokowi pada tahun 2014. Naskah tersebut tentunya dibuat oleh tim khusus karena urgensinya yang sangat besar untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai harapan pemerintahannya lima tahun ke depan. Tentunya, naskah tersebut

juga ditujukan untuk membangun citra politik yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam teks. Adapun citra politik yang ingin ditekankan Jokowi terlihat pada paragraf berikut.

Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, supir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras bahu membahu, bergotong royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, untuk bekerja dan bekerja.

Urutan penyebutan profesi dalam paragraf di atas sangat menarik karena menunjukkan citra yang ingin ditunjukkan Jokowi kepada masyarakatnya. Apabila mengacu pada tingkat ekonominya, naskah pidato tersebut menempatkan kelas menengah ke bawah sebagai profesi yang pertama disebutkan seperti nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, supir. Urutan penyebutan tersebut menunjukkan citra politik yang ingin dibangun Jokowi, yakni pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil atau merakyat. Citra ini memang cukup kuat pada PEMILU 2014 sehingga Jokowi dapat terpilih menjadi presiden. Citra merakyat ini bahkan juga diakui oleh Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md.

Jokowi itu bersih, jujur, sederhana dan merakyat. Ia muncul dari kekuatan rakyat, hal ini tidak dapat dipungkiri (<https://republika.co.id/>). Selain itu, kata kunci Jokowi Merakyat ini sangat populer pada pemberitaan media massa pada tahun 2014. Dengan demikian, naskah pidato tersebut telah disusun secara strategis untuk menegaskan kembali citra politik Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat.

Selain merakyat, citra dominan yang dibangun dalam naskah pidato kepresidenan perdana Jokowi pada tahun 2014 adalah motto bekerja, bekerja, bekerja. Kata kerja sendiri disebutkan sebanyak 16 kali dalam naskah pidatonya. Hal tersebut menunjukkan komitmen Jokowi untuk menunjukkan arti penting kata tersebut baginya. Bahkan, motto bekerja, bekerja, bekerja itu disebutkan dua kali dalam dua paragraf yang berbeda.

karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, untuk bekerja dan bekerja. (p.2)

Oleh sebab itu, bekerja, bekerja dan bekerja adalah yang utama. (p.3)

Temuan ini menunjukkan bahwa citra politik yang ingin dibangun Jokowi adalah kerja kerasnya. Komitmennya terhadap citra tersebut bahkan terdapat pada penamaan kabinetnya pada masa jabatan 2014—2019, yakni Kabinet Kerja.

KESIMPULAN

Struktur naskah pidato kepresidenan pertama Jokowi pada tahun 2014 yang disampaikan sesuai sumpah jabatan pada pelantikan presiden terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Naskah tersebut secara umum berisi persepsi, afeksi, kognisi, dan keinginan dari Joko Widodo atas status barunya sebagai presiden. Hal tersebut tampak pada proses mental yang ditemukan di 20 klausa dari 34 klausa yang ada melalui kata modalitas yang cukup dominan seperti *ingin*, *harus*, *akan*, *tidak mampu*, dan *tidak akan*. Selain itu, naskah tersebut juga memuat pewartaan melalui proses verbal bahwa ia telah dilantik menjadi presiden dan akan memimpin jalannya pemerintahan 2014—2019.

Naskah pidato tersebut memiliki peran dalam mengkonstruksi ideologi dan citra politik yang dianut Jokowi dalam pemerintahannya lima tahun mendatang. Ideologi yang dikonstruksi dalam naskah tersebut adalah (1) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, (2) pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, (3) penguatan figur Soekarno. Ideologi pertama tersebut dibuktikan dengan banyaknya penggunaan kata-kata yang sarat akan unsur laut seperti laut, gelombang, nahkoda, dan ombak. Bahkan, naskah tersebut juga memuat semboyan TNI AL yang berasal dari zaman Majapahit, yakni *jalesveva jayamahe*. Penggunaan semboyan tersebut digunakan dalam naskah untuk mengingatkan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang dulu sangat berjaya di sektor Maritim terutama di kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Ideologi kedua yang sekaligus menjadi cita-cita pemerintahan Jokowi tersebut menjadi bentuk afirmatif Jokowi untuk kepercayaan masyarakat yang memilihnya menjadi presiden. Sementara itu, kuatnya figur Soekarno pada ideologi politik Jokowi tampak pada penyebutan pesan Soekarno di akhir naskahnya, yakni *cakrawarti samudera*. Kuatnya figure

Soekarno dalam naskah pidato tersebut juga terkait dengan afiliasi politik Jokowi, yakni Partai PDI-Perjuangan.

Selain mengkonstruksi ideologi politik, naskah pidato tersebut juga memiliki peran dalam membangun wacana citra politik Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan kerja keras. Hal ini ditunjukkan dengan urutan penyebutan profesi ketika ia menyapa rakyatnya dalam naskah pidato yang diawali dari golongan kelas menengah ke bawah seperti *nelayan*, *kaum buruh*, dan sebagainya. Urutan tersebut dikonstruksi sebagai bentuk afirmasi atas citra politik Jokowi yang memang terkenal sederhana dan merakyat pada PEMILU 2014. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya *headline* berita Jokowi Merakyat. Citra Jokowi sebagai sosok yang pekerja keras juga dikonstruksikan dalam naskah melalui penggunaan kata *kerja* sebanyak 16 kali dalam naskah dan penyebutan semboyan *bekerja, bekerja, bekerja* sebanyak dua kali. Bahkan, ada baris dalam naskah yang menyebutkan bahwa bekerja adalah hal yang utama.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta, Indonesia: PT Indeks.
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- Junaedi, Fajar. (2013). *Komunikasi Politik : Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Buku Litera.
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2015). *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*. Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Yuwono, Untung. (2019). *Ideologies underpinning the Indonesian National Qualification Framework (IQF) for higher education website text*. Indonesian Journal of Applied Linguistics. Vol. 8 No. 3, January 2019, pp. 668-677. doi: 10.17509/ijal.v8i3.15271.
- <https://jurnalmaritim.com/mengenang-deklarasi-djuanda-di-hari-nusantara/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2021).
- <https://republika.co.id/berita/n6msqy/mahfud-jokowi-itu-bersih-jujur-sederhana-dan-merakyat> (diakses pada tanggal 10 Januari 2021).

Sumber data primer

https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=120&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi

Sumber data sekunder

UU No. 43 tahun 2009

UU No.4/PRP/1960

UU Nomor 17 Tahun 1985

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis> (diakses pada tanggal 11 Januari 2021)

Biodata:

- a. Nama Lengkap : Menik Lestari
- b. Institusi/Universitas : Universitas Indonesia
- c. Alamat Surel : meniklestari89@gmail.com; menik.lestari01@ui.ac.id
- d. Pendidikan Terakhir : S-1 Sastra Indonesia, FIB UI
- e. Minat Penelitian : Linguistik Deskriptif, morfosintaksis, kajian wacana